Menyatukan Kekuatan Islam di Jawa: Dinamika Relasi Kuasa antara Cirebon dengan Demak pada Masa Awal Islam di Indonesia Abad ke-15-16 M

Zaenal Masduqi¹⁾, Aah Syafa'ah²⁾, Didin Nurul Rosidin³⁾, Farihin⁴⁾, Asep Saefullah⁵⁾

UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Jl. Perjuangan ByPass Sunyaragi, Kec. Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat 45131,

Email: zaenalmasduqi@syekhnurjati.ac.id¹⁾, Email: syafaahashali679@gmail.com²⁾, Email:

didinnurulrosidin@uinssc.ac.id³⁾, Yayasan Salaka Lintang Kerti, Jl. Ki Gede Mayaguna, RT.03/RW.07, Kaliwadas,

Kec. Sumber, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Email: mawarlaututara@gmail.com⁴⁾, Badan Riset dan Inovasi

Nasional (BRIN), Jl. Gatot Subroto No.10, RT.6/RW.1, Jakarta 12710, Email: aseplektur02@gmail.com⁵⁾

Abstrak

Artikel ini membahas hubungan strategis dan penyatuan kekuatan antara Kesultanan Cirebon dan Demak pada abad ke-15-16 M dalam berbagai aspek, termasuk relasi kuasa melalui pernikahan, keilmuan, dakwah Islam, militer, dan kesuksesan. Permasalahannya adalah bagaimana terbentuk hubungan antara Kesultanan Demak dan Cirebon hingga menjadi kekuatan yang bersatu, dan bagaimana keduanya dapat mengembangkan hubungan tersebut sehingga memengaruhi arah perkembangan Islam selanjutnya di Jawa. Metode yang digunakan adalah metode sejarah dengan langkah-langkah heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa hubungan keduanya tidak hanya berlandaskan aspek politik, tetapi juga nilai-nilai keagamaan dan militer yang memengaruhi perkembangan Islam di Nusantara. Hubungan Cirebon dan Demak ditandai dengan upaya integrasi melalui perkawinan, pengaruh ulama dalam sistem pemerintahan, serta kerja sama dalam menghadapi ancaman eksternal seperti Majapahit, Pajajaran, dan Portugis. Konflik internal dalam Kesultanan Demak juga turut mempengaruhi keseimbangan politik, di mana Cirebon berperan dalam menentukan stabilitas kerajaan Islam di Jawa. Dengan menggunakan pendekatan sejarah dan analisis teori hubungan kekuasaan, penelitian ini memberikan wawasan mengenai dinamika kekuasaan dan interaksi politik antara kedua kerajaan yang berkontribusi terhadap perkembangan Islam di Nusantara.

Kata Kunci: Kesultanan Cirebon, Kesultanan Demak, relasi kuasa, sanad keilmuan, aliansi dan konflik

Abstract

This article examines the strategic alliance and consolidation of power between the Sultanates of Cirebon and Demak during the 15th and 16th centuries CE across various dimensions, including political relations through marriage, scholarship, Islamic proselytization (dakwah), military cooperation, and succession. The central issue addressed is how the relationship between Demak and Cirebon developed into a unified force and how this alliance influenced the subsequent trajectory of Islam in Java. The study employs the historical method, encompassing the stages of heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. The findings reveal that the relationship between the two sultanates was grounded not only in political considerations but also in shared religious and military values that significantly shaped the spread of Islam in the Indonesian archipelago. The alliance was marked by integrative efforts such as dynastic marriages, the involvement of Islamic scholars (ulama) in governance, and collaboration in confronting external threats, including those posed by Majapahit, Pajajaran, and the Portuguese. Furthermore, internal conflicts within the Demak Sultanate had a bearing on the region's political equilibrium, with Cirebon playing a pivotal role in ensuring the stability of Islamic rule in Java. Through a historical approach and an analysis of power relations theory, this study offers insights into the dynamics of political interaction and authority between these two kingdoms and their contribution to the development of Islam in the archipelago.

Keywords: Cirebon Sultanate, Demak Sultanate, power relations, scientific sanad, alliances and conflicts

* Naskah diterima Maret 2025, direvisi April 2025, dan disetujui untuk diterbitkan Mei 2025

<https://doi.org/10.47655/dialog.v48i1.1092>

Dialog, 48 (1), 2025, 41-57

<https://jurnaldialog.kemenag.go.id>, p-ISSN: 0126-396X, e-ISSN: 2715-6230

This is open access article under CC BY-NC-SA-License

(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>)

Pendahuluan

Kontestasi politik menjadi salah satu wajah utama sejarah Islam di berbagai belahan dunia, bahkan sejak masa paling awal. Sejarah Islam menunjukkan bagaimana Umayyah di Andalusia dan Abbasiyah di Bagdad berkontestasi bahkan berkonfrontasi satu dengan yang lain selama berabad-abad (Lapidus, 2014; Madjid, 2020). Bahkan pada masa keduanya masih ada, terdapat beberapa dinasti yang melakukan hal yang sama. Fenomena ini juga terjadi di wilayah Asia Tenggara, Nusantara, bahkan Pulau Jawa secara spesifik. Antara abad ke-15-17 M, ketika Islam mulai disebarkan secara lebih intensif dan masif, sejarah menyaksikan kontestasi bahkan konfrontasi kerajaan-kerajaan Islam di Pulau Jawa, seperti Cirebon, Demak, Pajang, Mataram Islam hingga Banten (de Graaf & Pigeaud, 1985; Ricklefs, 2006). Namun demikian, kontestasi politik tidak selalu berkonotasi konflik; sebagian juga membangun aliansi politik yang mampu memperkuat bahkan menyatukan kaum Muslim di antara kekuatan politik Islam yang ada (Al Fairusy MA, 2024; Fakhri, 2024).

Secara historis, tentang Islamisasi Pulau Jawa maupun Asia Tenggara, terdapat banyak teori. Teori-teori itu tentu saja berdampak pada perbedaan kesimpulan tentang kapan Islam sebenarnya mulai dikenalkan ke masyarakat wilayah perifer yang jauh dari pusat peradaban Islam di Timur Tengah ini (Burhanudin, 2023). Misalnya, teori Arab menyatakan bahwa Islam didatangkan langsung dari tanah Arab oleh para mubaligh, meyakini bahwa Islam telah hadir sejak abad pertama Islam diperkenalkan oleh Nabi Muhammad Saw. (Azra, 2013; Putuhena, 1997). Namun, teori-teori yang lain menolaknya karena ada proses yang cukup panjang secara waktu karena Islam terlebih dahulu singgah di wilayah lain seperti China, Gujarat, maupun Persia sebelum benar-benar hadir ke wilayah Asia Tenggara termasuk Jawa (Azra, 2013; Reid, 1984).

Lepas dari berbagai teori tersebut, secara umum, proses Islamisasi terjadi melalui tiga tahapan utama dengan durasi dan proses yang cukup kompleks dan dinamis (Burhanuddin,

2017; Putuhena, 2007). Tiga tahap tersebut adalah kedatangan, penerimaan, dan pelebagaan. Kedatangan menunjukkan fakta hadirnya orang Islam di wilayah yang menjadi lahan Islamisasi. Misalnya, Makam Fatimah binti Maimun di Loran, Gresik, Jawa bagian timur, menunjukkan bahwa Islam dalam arti kehadirannya, telah ada sejak abad ke-11 M. Namun, tidak banyak bukti yang menunjukkan adanya proses penerimaan Islam oleh penduduk lokal (Burhanudin, 2018; Purnomo & Dinar, 2023, hal. 165–166).

Situasi berbeda pada abad ke-15 M, ketika tercatat banyak penduduk lokal yang menjadi muallaf sebagai hasil dari usaha luar biasa yang dilakukan oleh mereka yang secara populer disebut Walisongo (Sakhok & Musadad, 2024; Tjandrasasmita, 2003). Ini merupakan tahap penerimaan Islam (Putuhena, 1997). Selanjutnya, ketika Islam semakin terlihat kehadirannya, muncullah tahap ketiga, yaitu pelebagaan. Tahap ini dibuktikan dengan munculnya masjid, langgar, atau tajug yang menjadi pusat kegiatan umat Islam. Lembaga ini selanjutnya diperkuat oleh munculnya pesantren yang merupakan tipologi khas pendidikan Islam lokal dan juga berdirinya institusi politik kerajaan atau kesultanan, seperti Kesultanan Pasai di ujung Pulau Sumatra, Cirebon dan Demak di Pulau Jawa (de Graaf & Pigeaud, 1985; Fuadi, 2021; Sulistiono, 2018). Berdirinya institusi politik ini bisa dikatakan sebagai puncak keberadaan Islam sekaligus sebagai agen utama penyebaran dan penerimaan Islam oleh penduduk lokal di berbagai wilayah Pulau Jawa. Tidak heran jika kemudian Islam menjadi agama yang dipeluk secara mayoritas oleh penduduk lokal (Sulistiono, 2018; Tjandrasasmita, 1997).

Meskipun demikian, perlu dicatat sejak awal bahwa kehadiran institusi-institusi politik ini dalam kenyataannya juga melahirkan pola relasi kuasa antara mereka. Aliansi, kontestasi hingga konfrontasi mewarnai relasi kuasa antara berbagai Kesultanan Islam yang ada di Pulau Jawa (Richtig & Maulana, 2022; Ricklefs, 2006).

Berdasarkan uraian di atas, artikel ini bertujuan mengkaji bagaimana hubungan

antara Kesultanan Demak dan Cirebon terbentuk dan berkembang melalui mekanisme aliansi politik, sanad keilmuan, serta kerja sama militer. Selain itu, artikel ini juga bermaksud mengeksplorasi peran perkawinan antar-wangsa elit, hubungan guru-murid dalam transmisi ilmu keislaman, serta kolaborasi militer dalam menghadapi ancaman eksternal seperti Majapahit dan Portugis. Tujuan lainnya adalah mengungkap bagaimana interaksi antara Demak dan Cirebon itu tidak hanya membentuk konfigurasi politik kerajaan-kerajaan Islam di Jawa, tetapi juga berdampak pada penyebaran Islam di Nusantara. Dengan menelusuri keterlibatan Cirebon dalam konflik suksesi Demak serta perannya dalam ekspansi wilayah Islam, kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran lebih jelas mengenai dinamika politik Islam di Nusantara pada abad ke-15 dan ke-16 M.

Sejalan dengan tujuan tersebut, kajian ini diharapkan bermanfaat secara akademis untuk 1) Menambah wawasan dalam studi sejarah Islam di Nusantara, khususnya mengenai hubungan politik dan militer di antara kerajaan-kerajaan Islam; 2) Memperkaya kajian historiografi Nusantara dengan pendekatan interdisipliner yang mencakup sejarah politik, keislaman, dan sosial; dan 3) Menjadi referensi bagi peneliti dalam mengembangkan studi tentang peran kerajaan Islam dalam membangun diplomasi regional. Sedangkan manfaatnya secara praktis adalah 1) Memberikan pemahaman bagi pemerintah dan pemangku kebijakan mengenai model diplomasi berbasis sejarah Islam yang dapat diterapkan dalam hubungan internasional saat ini, terutama dalam konteks kerja sama maritim dan ekonomi regional; 2) Mendorong integrasi kajian sejarah Islam Nusantara dalam kurikulum pendidikan agar generasi muda lebih memahami warisan politik dan intelektual para pendahulu; dan 3) Menginspirasi masyarakat dalam memahami nilai-nilai persatuan yang telah diterapkan oleh kerajaan Islam dalam menghadapi tantangan geopolitik dan militer pada masanya.

Studi tentang Kesultanan Demak dan Cirebon sesungguhnya telah banyak dilakukan

oleh para sejarawan dan peneliti. Mereka mencoba memahami dinamika politik dan keagamaan di Jawa pada masa transisi dari kekuasaan Hindu-Buddha ke Islam. Salah satu karya penting dalam kajian ini adalah buku de Graaf dan Pigeaud, yaitu *Kerajaan-Kerajaan Islam di Jawa (1500–1700)*, yang membahas bagaimana kerajaan-kerajaan Islam di Jawa, termasuk Demak dan Cirebon, tumbuh dan berkembang, kemudian membentuk aliansi politik dan memperluas pengaruhnya setelah keruntuhan Majapahit (de Graaf & Pigeaud, 1985). Mereka menekankan bagaimana Kesultanan Demak menjadi pusat kekuatan politik Islam pertama yang mampu menggantikan dominasi Hindu-Buddha di Jawa, dengan dukungan dari jaringan ulama seperti Wali Songo, termasuk Sunan Gunung Jati dari Cirebon (Cf. Qosim, 2019).

Ricklefs dalam *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004* memberikan gambaran yang lebih luas tentang perkembangan Islam di Jawa yang tidak hanya berkaitan dengan aspek keagamaan tetapi juga dengan dinamika politik (Ricklefs, 2007). Ia menjelaskan bahwa Kesultanan Demak memanfaatkan kekuatan militer dan politik untuk memperluas kekuasaannya, sementara Cirebon memainkan peran penting dalam memperkuat jaringan keilmuan dan dakwah di Jawa Barat. Ia juga menunjukkan adanya hubungan di antara kedua kesultanan ini yang sering kali bersifat pragmatis, dengan aliansi yang dibentuk berdasarkan kebutuhan politik dan militer (Ricklefs, 2007).

Sunyoto dalam *Atlas Wali Songo* mengkaji kontribusi penting Wali Songo dalam penyebaran Islam di Jawa, seperti juga diungkap Thahir dalam *Islam of the Archipelago* (Sunyoto, 2017; Thahir, 2021). Sunyoto menyoroti bagaimana Sunan Gunung Jati tidak hanya berperan sebagai ulama tetapi juga sebagai penguasa politik di Cirebon. Hubungan antara Sunan Gunung Jati dengan Raden Patah dari Demak menunjukkan bahwa sanad keilmuan digunakan sebagai alat untuk membangun legitimasi politik. Sedangkan Thahir, sebagaimana Sunyoto, mengungkap peran penting Wali Songo dalam membentuk struktur kekuasaan di kerajaan-kerajaan Islam

di Jawa, yaitu dengan menggabungkan peran keagamaan dan politik (Sunyoto, 2017; Thahir, 2021).

Sulendraningrat dan Sudjana dalam *Purwaka Caruban Nagari* (P. S. S. Sulendraningrat & Sudjana, 1983) dan Sulendraningrat sendiri dalam *Babad Tanah Sunda/Babad Cirebon* (P. S. Sulendraningrat, 1984) memberikan perspektif sejarah lokal tentang Kesultanan Cirebon, dengan fokus pada hubungan antara Cirebon dan kerajaan-kerajaan lain di Jawa, termasuk Demak. Mereka menunjukkan bagaimana perkawinan politik digunakan sebagai alat untuk memperkuat aliansi antara Cirebon dan Demak, serta bagaimana hubungan keilmuan antara Sunan Gunung Jati dan Raden Patah membentuk dasar bagi kerjasama politik dan militer di antara kedua kesultanan tersebut.

Selanjutnya, Purwadi dan Maharsi dalam *Babad Demak* memberikan wawasan tentang sejarah Kesultanan Demak, dengan fokus pada hubungan antara penguasa Demak dan para ulama, termasuk Sunan Gunung Jati. Mereka menekankan bahwa Wali Songo memainkan peran penting dalam pengangkatan Raden Patah sebagai penguasa pertama Demak. Mereka juga menunjukkan bahwa kekuasaan politik di Demak sangat bergantung pada legitimasi keagamaan yang diberikan oleh para ulama terkemuka (Purwadi & Maharsi, 2012).

Selain kajian yang berfokus pada sejarah politik dan keagamaan, Peter Carey dalam *The Power of Prophecy; Prince Dipanagara and the end of an old order in Java 1785-1855* dan Sudardi dan Istadiyantha dalam *The Javanese War*, yang membahas biografi dan perlawanan Pangerang Diponegoro terhadap Kolonial Belanda, memberikan analisis tentang bagaimana kekuasaan tradisional di Jawa dibangun dan dipertahankan melalui hubungan politik dan keagamaan (Carey, 2008; Sudardi & Istadiyantha, 2020). Meskipun karya mereka berfokus pada periode yang lebih kemudian, analisis mereka tentang hubungan antara kekuasaan politik dan keagamaan relevan untuk memahami dinamika serupa dalam hubungan antara Demak dan Cirebon.

Kemudian, Yakub dalam *Historiografi Islam Indonesia* dan Hakim *et al.* dalam *Analisis*

Historiografi terhadap Karya Azyumardi Azra "Jaringan Ulama", keduanya memiliki kesaamaan dalam membahas pendekatan historiografi kritis dalam menulis sejarah Indonesia, khususnya sejarah Islam di Indonesia (Hakim *et al.*, 2020; Yakub, 2013). Yakub menekankan pentingnya memahami sejarah tidak hanya sebagai narasi kronologis tetapi juga sebagai proses sosial dan politik yang melibatkan berbagai aktor dengan kepentingan yang berbeda-beda. Pendekatan ini relevan untuk kajian Sejarah Indonesia dari perspektif Indonesia (dari dalam) karena dapat membantu memahami bagaimana Kesultanan Demak dan Kesultanan Cirebon membangun dan mempertahankan kekuasaan mereka melalui strategi politik, keagamaan, dan militer (Dwicahyo, 2021b; Hasyim, 2021, hal. 6–10).

Selain itu, Anthony Reid (2011) dalam *Asia Tenggara dalam Kurun Niaga (Jilid 2)* membahas bagaimana kerajaan-kerajaan di Asia Tenggara, termasuk Demak dan Cirebon, membangun kekuasaan mereka melalui perdagangan, politik, dan agama (Reid, 2011). Reid menunjukkan bagaimana perdagangan maritim di pesisir utara Jawa memainkan peran penting dalam memperkuat kekuasaan politik kerajaan-kerajaan Islam, termasuk aliansi antara Demak dan Cirebon yang didasarkan pada kepentingan ekonomi dan politik Bersama (Reid, 2011). Lalu, Risimasse, meskipun fokusnya pada masa awal sistem perdagangan rempah di Maluku, tetapi juga menjelaskan bagaimana jaringan perdagangan di Nusantara terbentuk sebelum masuknya para penjelajah dari Asia Barat, Tiongkok, dan Eropa (Ririmasse, 2017).

Berdasarkan kajian-kajian terdahulu seperti diulas di atas, sebagian besarnya lebih berfokus pada deskripsi kronologis atau biografis tokoh-tokoh penting. Dinamika politik, sosial, dan ekonomi, meskipun telah dikaji, lebih banyak dari perspektif masing-masing kerajaan atau dalam konteks lebih luas dan umum, seperti kajian *Asia Tenggara dalam Kurun Niaga*-nya Reid dan *Atlas Wali Songo*-nya Sunyoto. Akibatnya, tidak terlihat secara jelas bagaimana teori-teori kekuasaan dan sosial-politik mengungkap adanya mekanisme kekuasaan secara lebih kompleks, tetapi pada akhirnya dapat

melahirnya sebuah kekuatan bersama di antara kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara tersebut. Oleh karena itu, kebaruan dari kajian ini terletak pada integrasi pendekatan teoritis sosial-politik untuk memahami relasi kuasa, khususnya antara Kesultanan Demak dan Kesultanan Cirebon, yang kemudian dapat membangun kekuatan atau aliansi bersama.

Kebaruan lainnya adalah tentang peran Cirebon yang tidak hanya sebagai pengikut Demak, sebagaimana sering dikesankan, tetapi justru ia memiliki otoritas keagamaan dan pengaruh politik dalam dinamika kekuasaan di Jawa. Cirebon, karenanya, tidak hanya sebagai sekutu minor Demak, tetapi juga memiliki peran aktif dan penting, khususnya dalam membentuk aliansi politik Islam di Jawa. Dalam konteks tersebut, kajian ini tidak hanya merevisi narasi dominan tentang hubungan subordinatif antara Demak dengan Cirebon tetapi juga memberikan perspektif baru tentang bagaimana kerajaan-kerajaan Islam di Jawa membangun dan mempertahankan kekuasaan mereka secara bersama-sama dan setara.

Sehubungan dengan itu, ada beberapa kerangka teori yang digunakan dalam kajian ini. Pertama, *strategic marriage alliances*, yakni bahwa pernikahan antar wangsa dapat dilihat sebagai strategi politik yang umum digunakan dalam sistem kerajaan tradisional (Levi-Strauss, 1969; Cf. Prechel, 1980). Kedua, teori *social capital* (Putnam, 1993), bahwa hubungan keilmuan dapat menjadi modal sosial yang memperkuat legitimasi politik. Dalam konteks Islam, sanad keilmuan berperan dalam membangun otoritas keagamaan, yang kemudian bertransformasi menjadi kekuatan politik. Ketiga adalah teori *sacred space* dari Eliade yang menyebutkan bahwa tempat-tempat suci, seperti masjid, sebagai ruang sakral dapat berperan dalam membangun legitimasi keagamaan dan juga politik (Eliade, 1959). Keempat, teori *realism in international relations* (Morgenthau, 1948) yang menyatakan bahwa negara atau kerajaan akan membentuk aliansi militer berdasarkan kepentingan keamanan dan kekuatan relatif. Kelima, teori *power transition* (Organski, 1958) untuk melihat konflik suksesi ketika perubahan keseimbangan kekuatan memunculkan

tantangan bagi kepemimpinan yang terjadi dalam sebuah kekuasaan atau negara.

Adapun relasi kuasa yang dimaksud dalam kajian ini terkait dengan kekuasaan yang dimaknai sebagai kemampuan agen atau pemilik kekuasaan dalam mengeksploitasi kekuasaannya. Lebih jauh, Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan, sebagaimana dikutip oleh Budiardjo, menyatakan bahwa "Kekuasaan adalah suatu hubungan di mana seseorang atau sekelompok orang dapat menentukan tindakan seseorang atau kelompok lain ke arah tujuan dari pihak pertama (*Power is a relationship in which one person or group is able to determine the action of another in the direction of the former's own ends*)" (Budiardjo, 2007, hal. 60). Lepas dari perbedaan titik tolaknya, kekuasaan menekankan unsur keterpengaruhan dan kepatuhan. Hal ini juga dijelaskan oleh Kelly dan Turner yang melihat adanya dua indikator terkait dengan relasi kekuasaan, yaitu kesetiaan secara sukarela melalui proses persuasi (*persuasion*) dan kesetiaan karena perintah atau pemaksaan (*coercion*) (Kelly, 1987, pp. 332–333; Turner, 2005, hal. 10–11). Turner kemudian menambahkan hal lain, yaitu adanya otoritas sehingga seseorang atau kelompok, termasuk negara, dapat mensubordinasi pihak lain dengan otoritas yang dimilikinya (Turner, 2005, hal. 11). Akan tetapi, ada pula cara yang dianggap paling ampuh dalam merebut kekuasaan, yaitu dengan kekerasan fisik (*force*) (Budiardjo, 2007, hal. 61).

Metode

Kajian ini menggunakan pendekatan sejarah karena objek kajiannya adalah peristiwa yang terjadi pada masa lalu. Untuk merekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif dilakukan tahapan pelaksanaan metode penelitian sejarah, yaitu: *Pertama*, heuristik, yaitu pengumpulan data, yang karena melihat waktu terjadinya peristiwa yang diteliti bertumpu pada dua jenis sumber, yakni tulisan dan artefak (Sulasman, 2014, hal. 74–75), seperti naskah sejarah lokal tentang *Naskah Rante Martabat Tembung Wali*, *Naskah Wangsakerta Negara Kretabhumi Sarga Tiga*, *Naskah Purwaka Caruban Nagari*, *Naskah Rante Kanoman*, *Naskah*

Rante Kaprabonan, Naskah Kacerbonan, Tahun Jim Akhir dan Babad Demak. Sementara untuk artefak yang ditelusuri antara lain situs sejarah terkait dengan topik yang diteliti yang ada di sekitar Cirebon, seperti keraton, mesjid, dan benda-benda pusaka. *Kedua*, kritik atau verifikasi sumber yang bertumpu pada dua pertanyaan utama; apakah sumber yang telah berhasil dikumpulkan itu berupa data primer (sisi eksternal) dan apakah kontennya dapat dipercaya atau dipertanggung jawabkan (sisi internal)? (Kuntowijoyo, 1994; Saebani, 2008, hal. 198). *Ketiga* adalah interpretasi, yaitu melakukan analisis (menguraikan) dan sintesis (menyatukan) data yang ditemukan guna membangun rekonstruksi sejarah berdasarkan kronologisnya (Saebani, 2008, hal. 199). Terakhir, *keempat* adalah historiografi, yakni menarasikan hasil konstruksi sejarah secara kronologis beserta hasil analisis dan sintesis data yang dilakukan sebelumnya. (Gottschalk, 1986, hal. 143).

Hasil dan Pembahasan

Sekilas tentang Kesultanan Demak

Kesultanan Demak awalnya merupakan sebuah pedukuhan yang di dalamnya dibangun padepokan. Adapun letak padepokan tersebut di pesisir yang banyak ditumbuhi gelagah berbau harum, sehingga padepokan tersebut juga dikenal dengan nama Padepokan Gelagah Wangi (Purwadi & Maharsi, 2012). Wilayah ini berada di pesisir utara Pulau Jawa dan menjadi salah satu pangkalan jaringan perdagangan global sebelum abad ke-15 M (Utami et al., 2023).

Raden Patah (atau "Fatah"; lahir 1448 M) sebagai sultan pertama Kesultanan Demak memulai karirnya dengan belajar agama kepada Sunan Ampel, guru sekaligus mertuanya melalui pernikahannya dengan putri sang guru yang bernama Nyai Murtasimah (Sunyoto, 2017). Baik Raden Patah maupun Sunan Ampel masih terhitung bangsawan Majapahit. Yang pertama adalah anak Prabu Brawijaya V Raja Majapahit, sedangkan yang kedua adalah keponakan Dewi Darawati, salah satu istri Prabu Brawijaya V. Prabu Brawijaya V sendiri tidak lain adalah Sri Kartawijaya yang bergelar

Abhiseka Wijaya Parakramawarddhana dan dimakamkan di Kertawijayapura (Qosim, 2019; Sukatno & Mulyono, 2021; Sunyoto, 2017).

Dari jalur ibu, Raden Patah memiliki hubungan dengan mubalig pertama di bagian barat Pulau Jawa, yaitu Syekh Hasanudin atau Syekh Quro Karawang (Sulistiyono, 1997; Tjandrasasmita, 2009). Salah seorang putranya, yang dikenal dengan nama Syekh Bentong, memiliki putri bernama Dewi Siu-Ban-Ci, yang merupakan ibu Raden Patah. Hal ini sebagaimana tercantum dalam buku *Suma Oriental* karya Tome Pires (Pires, 1944) dan Naskah *Carita Purwaka Caruban Nagari* (Atja, 1986). Syekh Hasanudin sendiri dalam berbagai riwayat lokal Cirebon merupakan guru nenek Sunan Gunung Jati, Nyi Mas Subang Larang (P. S. S. Sulendraningrat & Sudjana, 1983). Dengan demikian, Sunan Gunung Jati, yang kelak menjadi sultan Kesultanan Cirebon terhubung dengan Raden Patah melalui sosok Syekh Hasanudin Quro Karawang. Jika Raden Patah tersambung melalui sanad nasab, Sunan Gunung Jati tersambung melalui sanad keilmuan (Adeng, 2009; Rosidin, 2017; Sya'roni et al., 2022, hal. 120).

Raden Patah dinobatkan sebagai sultan pertama di Kesultanan Demak pada Senin Kliwon malam Selasa Legi, tanggal 11 malam 12 Rabiul Awal tahun 860 H atau 16 Mei 1482 M. Pada saat penobatannya, Raden Patah berusia 34 tahun dan bergelar "Sultan Fattah Syekh Akbar Panembahan Jimbun Abdurrahman Sayyidin Panatagama Khalifatullah Ing Bintoro Demak" (Khafid, 2008, hal. 67). Melihat waktu pelaksanaan penobatan, besar kemungkinan penobatan itu dilakukan bersamaan dengan peringatan tradisi Maulid Nabi Saw yang telah diperkenalkan sejak era Walisongo. Tradisi ini terus dilestarikan oleh berbagai kesultanan Islam di Pulau Jawa dengan istilah berbeda seperti Panjang Jimat atau Sekatenan di Cirebon, Grebeg Sekaten di Yogyakarta dan Solo (Ricklefs, 2006; Ubaidillah & Marpuah, 2021).

Selama Kesultanan Demak berada di bawah pimpinan Raden Patah, kesultanan ini berkembang menjadi kekuatan politik utama di Pulau Jawa bagian tengah dan timur setelah

kemunduran Kerajaan Majapahit pada akhir abad ke-15 M (Abdullah, 2020; Purwanto, 2017). Dalam proses keruntuhan Majapahit, Demak terlibat dalam konflik internal kerajaan tersebut. Langkah strategis lain yang dilakukan adalah membangun aliansi politik dengan berbagai kekuatan Islam yang sudah muncul saat itu, seperti Giri dan Cirebon. Guna menjadikan Demak sebagai pusat agama dan kekuatan politik Islam, Raden Patah dengan dukungan dewan Walisongo membangun Masjid Agung Demak yang diresmikan pada tahun 1507 M (Anasom et al., 2020; de Graaf & Pigeaud, 1985, hal. 36; Nizam, 2022).

Pada tahun 1518, Raden Patah meninggal dan kedudukannya digantikan oleh putranya, Adipati Unus. Namun, dalam upaya penyerangan ke Malaka pada tahun 1521, Adipati Unus meninggal dunia dan kekuasaan berpindah ke Sultan Trenggono (Man et al., 2022; Utami et al., 2023). Dalam catatan Tome Pires, Sultan Trenggono dikenal dengan nama Pate Rodim (de Graaf & Pigeaud, 1985, hal. 46; Dwicahyo, 2021b, hal. 5). Selama masa pemerintahannya, Kesultanan Demak sangat ekspansionis dengan menaklukkan berbagai wilayah hingga ke Pulau Sumatra dan Kalimantan. Salah seorang panglimanya, Fatahillah, memimpin pasukan gabungan Demak dan Cirebon dalam menghancurkan Portugis di Sunda Kelapa pada tahun 1527 (Ali, 2022; Maulana et al., 2024; Rahardjo et al., 1996). Pada masa ini pula, Kesultanan Demak terlibat aktif dalam keruntuhan Majapahit pada tahun 1527, Sebagian menyebutnya tahun 1441 C (1519 M) (Birsyada, 2016; Laffan, 2015, hal. 11).

Sultan Trenggono akhirnya meninggal dunia dalam peperangan di Petarukan, Situbondo, pada tahun 1546 M. Posisinya digantikan oleh putranya, Sultan Prawoto. Namun, konflik internal antara Sultan Prawoto dengan saudara sepupunya, Raden Arya Penangsang, mengakibatkan tidak hanya meninggalnya sang Sultan tetapi juga runtuhnya Kesultanan Demak. Peristiwa ini menandai berdirinya Kesultanan Pajang di bawah kepemimpinan Sultan Hadiwijaya (Maulana et al., 2024; Ricklefs, 2006; Yatim, 2011, hal. 213).

Sekilas tentang Kesultanan Cirebon

Salah satu pendapat menyatakan bahwa Cirebon berasal dari kata *Caruban* yang berarti campuran karena sejak awal wilayah ini dibangun oleh komunitas yang sudah beragam secara etnis, yaitu Jawa, Sunda, Cina, Persia, dan Arab (Ambary, 1997; Tjandrasasmitha (Ed), 2009). Pendapat lain menyatakan bahwa Cirebon berasal dari gabungan dua kata Sunda, yaitu "ci" yang berarti air dan "rebon" yang berarti udang. Maka, kata Cirebon dimaknai sebagai "air udang," yang kemudian dikaitkan dengan produk makanan khas berupa terasi. Produk ini dalam catatan sejarah lokal digunakan sebagai bahan yang dijadikan *bulu bekti* kepada penguasa agung yang berkuasa di Pajajaran (Atja, 1986; Sulistiyono, 1997).

Pada tahun 1445 M, Pangeran Cakrabuana membuka lahan di Lemahwungkuk yang menjadi cikal bakal wilayah pertama Kesultanan Cirebon (Sulistiyono, 1997). Dua tahun kemudian, tepatnya tahun 1447 M, Pangeran Cakrabuana menjadi Kuwu kedua menggantikan Ki Danusela yang meninggal dunia (Djajadiningrat, 1983; Dwicahyo, 2021a; Jassin & Hidayat, 2019, hal. 3–4). Pada 1450 M, ia membangun tempat ibadah umat Islam yang kemudian dikenal sebagai Tajug Jalagrahan. Pembangunan ini menjadi bukti nyata komitmen Pangeran Cakrabuana dalam memperkuat posisi Islam sebagai agama utama di wilayah tersebut (de Graaf & Pigeaud, 1985; Jassin & Hidayat, 2019, hal. 4).

Pengembangan wilayah terus berlanjut ketika selama dua tahun (1452-1454), Pangeran Cakrabuana memprakarsai pembangunan Keraton Pakungwati. Pembangunan keraton ini bertepatan dengan wafatnya penguasa Mertasinga, Ki Gedeng Jumajan Jati, yang wilayahnya mencakup Amparan Jati tempat tinggal Syekh Nurjati (Koswara et al., 2019, hal. 392; P. S. Sulendraningrat, n.d.). Dengan bersatunya wilayah Mertasinga-Amparan Jati dengan Lemahwungkuk, Pangeran Cakrabuana ditahbiskan sebagai penguasa dengan wilayah yang lebih luas. Peningkatan status ini juga menandai perubahan status politiknya menjadi Tumenggung dengan gelar Sri Mangana. Sejak saat itu, wilayah ini dikenal dengan nama

Cirebon (Jassin & Hidayat, 2019, hal. 4).

Perkembangan Kesultanan Cirebon semakin pesat dengan kedatangan Syarif Hidayatullah pada 1479 M. Tidak lama setelah kedatangannya, Pangeran Cakrabuana menyerahkan kedudukannya kepada keponakannya tersebut. Setelah berkuasa selama tiga tahun, Syarif Hidayatullah yang kemudian bergelar Susuhunan Jati atau Maulana Jati mendeklarasikan kemerdekaan Cirebon dari Pajajaran pada 1482 M (de Graaf & Pigeaud, 1985). Sebagai simbol kemandirian, pada tahun 1489 M, ia membangun Masjid Agung Sang Cipta Rasa, yang menjadi pusat ibadah dan pemerintahan Islam di Cirebon (Sudjana, 2003; Sunardjo, 1996, hal. 38–39)

Keberhasilan Syarif Hidayatullah dalam melakukan konsolidasi kekuasaan membuka jalan bagi ekspansi wilayah dan penyebaran dakwah Islam. Sejarah mencatat berbagai langkah yang dilakukan, seperti penguatan hubungan dengan penguasa lokal di Banten, pengiriman mubalig ke berbagai wilayah untuk menyebarkan Islam, serta pembangunan pedukuhan atau kampung baru (Ricklefs, 2007). Selain itu, aliansi politik melalui pernikahan juga menjadi strategi penting dalam memperluas pengaruh Cirebon.

Pada tahun 1527 M, setelah keberhasilan penaklukan Sunda Kelapa, Syarif Hidayatullah mengangkat Maulana Hasanudin sebagai Adipati Anom yang berkuasa di Banten (Rahardjo et al., 1996). Perubahan politik besar terjadi pada 1529 M ketika Pangeran Cakrabuana wafat. Kepergian sang pendiri meninggalkan duka mendalam bagi Syarif Hidayatullah, yang akhirnya memutuskan untuk *lengser keprabon* dan fokus pada dakwah Islam. Sebagai penggantinya, ia mengangkat Pangeran Pasarean (l. 1495 M) sebagai Adipati Anom di Cirebon. Sedangkan di Banten, kepemimpinan tetap dipegang oleh Maulana Hasanudin (Kartodirdjo, 1993; Pudjiastuti, 2000; Yatim, 2011, hal. 214).

Seiring dengan berkembangnya Kesultanan Cirebon, Syarif Hidayatullah menyusun struktur pemerintahan dengan berbagai jabatan, mulai dari tingkat lokal hingga pusat. Kepala persekutuan masyarakat terkecil, yang terdiri

dari 20 kepala keluarga (*somah*), dipimpin oleh seorang *Ki Buyut*. Wilayah yang lebih besar disebut *dukuh* dan dipimpin oleh *Ki Kuwu*. Beberapa *dukuh* digabung menjadi wilayah yang dipimpin oleh *Ki Gede* atau *Ki Gedeng*. Di atasnya terdapat struktur kepemimpinan tingkat kabupaten yang dipimpin oleh Bupati, Adipati, atau Tumenggung. Para pejabat ini wajib menghadiri rapat bulanan *Seba Kliwonan* di Masjid Agung Sang Cipta Rasa, yang dipimpin langsung oleh Syarif Hidayatullah (Sudjana, 2003; Sunardjo, 1996, hal. 38–39). Fakta ini menunjukkan bawah Syarif Hidayatullah berhasil menyusun struktur pemerintahan, mekanisme kerja aparat negara, serta sistem administrasi yang efisien. Keberhasilannya dalam membangun Kesultanan Cirebon menjadikannya sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah perkembangan Islam di Nusantara.

Relasi Kuasa Demak dan Cirebon

a. Relasi Kuasa Melalui Perkawinan Antar Wangsa Elit

Dalam *Naskah Purwaka Caruban Nagari*, Pangeran Arya Carbon mencatat bagaimana relasi kuasa antara Kesultanan Cirebon dan Demak telah berlangsung sejak abad ke-15. Putra dan putri Sunan Gunung Jati, seperti Maulana Hasanudin, Pangeran Pasarean, Ratu Wulung Ayu, Pangeran Jayakelana, dan Pangeran Bratakelana, menjadi menantu Raden Patah, sultan pertama Demak. Maulana Hasanudin menikah dengan Ratu Ayu Purnama Sidi, yang dalam *Naskah Rane Martabat Tembung Wali* disebut Dewi Pangeran Ratu. Dari pernikahan itu lahir Maulana Yusuf, sultan kedua Kesultanan Banten (Pudjiastuti, 2007). Maulana Yusuf dapat dikatakan sebagai titik pertalian nasab antara wangsa Demak dan Cirebon, yang kemudian menjadi nenek moyang para raja Banten (Zaedin et al., 2020).

Dengan menggunakan teori *strategic marriage alliances*, pernikahan antar wangsa dapat dilihat sebagai strategi politik yang umum digunakan dalam sistem kerajaan tradisional (Levi-Strauss, 1969; Menget, 2008). Levi-Strauss (1969) dalam teori *alliance theory* menekankan bahwa pernikahan tidak hanya

berfungsi sebagai institusi sosial, tetapi juga sebagai instrumen politik untuk mengikat aliansi kekuasaan dan memperkuat stabilitas kerajaan (Levi-Strauss, 1969; McGee & Warms, 2013). Fenomena ini terlihat jelas dalam pernikahan para bangsawan Cirebon dan Demak.

Pernikahan lainnya melibatkan Pangeran Jayakelana dan Pangeran Bratakelana yang merupakan putra Sunan Gunung Jati dari pernikahan dengan Syarifah Bagdad. Jayakelana menikah dengan Ratu Pembayun, sementara Bratakelana menikah dengan Ratu Mas Nyawa. Namun, baik Jayakelana maupun Bratakelana meninggal di usia muda, sehingga kedua pernikahan ini tidak menghasilkan keturunan (P. S. S. Sulendraningrat & Sudjana, 1983). Oleh karena itu, pertalian wangsa antara Cirebon dan Demak berlanjut dengan pernikahan Ratu Wulung Ayu dari Cirebon dengan Adipati Unus, raja kedua Demak yang gugur dalam penyerangan ke Malaka pada 1521 M (Maulana et al., 2024; Utami et al., 2023).

Selain itu, Pangeran Pasarean menikah dengan Ratu Mas Nyawa, yang juga janda Pangeran Bratakelana, pada 1515 (Sudjana, 1987). Dari pernikahan ini lahir Pangeran Suwarga, yang diangkat sebagai putra mahkota pada 1552 dan menikah dengan Ratu Wanawati Raras, putri Fatahillah dan Ratu Wulung Ayu. Pangeran Suwarga memiliki putra yang kemudian naik takhta sebagai Penembahan Ratu I pada 1570 M. Hal ini menunjukkan bahwa pertalian wangsa melalui pernikahan menjadi faktor dominan dalam suksesi kepemimpinan di Cirebon (Sunardjo, 1996, hal. 44; Sya'roni et al., 2022).

Namun, suksesi Pangeran Pasarean bukan tanpa perlawanan. Pangeran Trusmi Mangkurat Sari, putra pertama Sunan Gunung Jati dari Nyi Mas Babada, menentang keputusan ini berdasarkan *fatwa* Sunan Gunung Jati yang menjanjikan dirinya sebagai penerus (Sunyoto, 2017; Utami et al., 2023). Hal ini menunjukkan bahwa, meskipun pernikahan menjadi alat untuk memperkuat kekuasaan, tetapi ada dinamika internal dalam penunjukan pemimpin kerajaan.

b. Relasi Kuasa Berbasis Sanad Keilmuan antara Demak dan Cirebon

Sejak awal berdirinya Kesultanan Demak, Raden Patah telah membangun relasi kemitraan dengan Kesultanan Cirebon di bawah kepemimpinan Sunan Gunung Jati. Salah satu bukti hubungan ini adalah keterlibatan Raden Patah dalam pembangunan Giri Nur Saptarengga, tempat tinggal pribadi Sunan Gunung Jati sekaligus pesantrennya (Sudjana, 1987). Raden Patah bahkan menganggap Sunan Gunung Jati sebagai gurunya, yang dihormati bukan hanya sebagai sesama murid Sunan Ampel, tetapi juga sebagai tokoh spiritual utama (Zaedin et al., 2020).

Dalam teori *social capital* (Putnam, 1993), hubungan keilmuan dapat menjadi modal sosial yang memperkuat legitimasi politik. Dalam konteks Islam, *sanad* keilmuan berperan dalam membangun otoritas keagamaan, yang kemudian bertransformasi menjadi kekuatan politik.

Dalam *Naskah Purwaka Caruban Nagari*, gelar "Patah" yang disematkan kepada penguasa Demak pertama merupakan anugerah dari seluruh anggota Dewan Walisongo, termasuk Sunan Gunung Jati (P. S. S. Sulendraningrat & Sudjana, 1983). Selain itu, Raden Trenggono juga memiliki hubungan keilmuan dengan Sunan Gunung Jati, sebagaimana tercatat dalam *Babad Demak* yang menyatakan bahwa Sunan Gunung Jati memberikan gelar "Sultan Ahmad Abdul Arifin" kepada Raden Trenggono (Purwadi & Maharsi, 2012).

Dari sini dapat dilihat bahwa Cirebon memiliki kedudukan yang lebih tinggi dalam aspek keilmuan, sementara Demak lebih unggul dalam aspek politik dan militer. Relasi ini membentuk pola kekuasaan yang saling menguntungkan bagi kedua kesultanan.

c. Relasi Dakwah Cirebon dan Demak

Sebagai dua kerajaan Islam yang berdiri pada abad ke-15 M, Cirebon dan Demak aktif dalam penyebaran Islam. Simbol utama dakwah mereka adalah masjid dan pusat belajar Islam, yang kemudian dikenal dengan pesantren. Masjid Agung Sang Cipta Rasa di Cirebon dan Masjid Agung Demak dibangun

dengan arsitektur yang mirip dan menggunakan simbol-simbol Majapahit (Purwanto, 2017; Sya'roni et al., 2022, hal. 16, 43).

Menurut teori *sacred space* dari Eliade, tempat ibadah, termasuk masjid sebagai ruang sakral berperan dalam membangun legitimasi religius dan politik (Barth, 2013; Eliade, 1959; Cf. Levi & Kocher, 2013). Dengan mendirikan masjid, para wali tidak hanya membangun tempat ibadah, tetapi juga menciptakan pusat kekuasaan yang mendukung dakwah Islam.

Pembangunan Masjid Agung Sang Cipta Rasa sempat ditunda karena Sunan Gunung Jati memilih memprioritaskan pembangunan Masjid Agung Demak (Nizam, 2022; Sudjana, 2003). Ketika Masjid Agung Demak dibangun, Sunan Gunung Jati mendapatkan tugas untuk menyiapkan *soko guru* (Lasmiyati, 2013, hal. 133). Setelah selesai Pembangunan Masjid Demak, Sunan Gunung Jati melanjutkan penyelesaian Pembangunan Masjid Sang Cipta Rasa. Masjid-masjid ini dibangun dengan atap tumpang tiga dan ornamen khas Majapahit, seperti Nawa Dewata (Kartika et al., 2020; Marwoto et al., 2014).

Kesamaan dari segi arsitektur dan kemiripan ornamennya menunjukkan kesinambungan budaya Islam dan Hindu-Buddha dalam arsitektur Nusantara. Adapun kerjasama antara Sunan Gunung Jati sebagai *Penetep Panatagama* Cirebon saat itu, dengan Raden Patah sebagai Sultan Demak. Sebaliknya, ketika Sunan Gunung Jati membangun Masjid Agung Sang Cipta Rasa, Raden Patah bahkan mengirimkan seorang arsitek terbaik yang berdarah Majapahit, yaitu Raden Sepat, dan dibantu juga oleh Sunan Bonang dan Sunan Kalijaga. Hal ini bukan saja mencerminkan relasi kuasa yang sejajar tetapi juga Kerjasama saling menguatkan dan menyatukan antara kekuasaan politik dan agama, sebagaimana ditegaskan oleh Eliade dalam teori *sacred space*-nya (Eliade, 1959).

d. Relasi Berbasis Militer Demak dan Cirebon

Pada awalnya, aliansi kekuatan militer antara Demak dan Cirebon dibangun sejak

pemerintahan Raden Patah. Aliansi ini sangat diperlukan mengingat adanya ancaman dari Majapahit dan Pajajaran selama akhir abad ke-15 dan awal abad ke-16 M. Serangan Girindrawardhana ke ibu kota Majapahit pada 1478 M menjadi ancaman bagi eksistensi Demak yang baru berdiri. Menyadari ancaman ini, Sultan Demak menyiapkan serangan terhadap Majapahit (Hasbullah, 2009, hal. 10; Sudjana, 1987). Dalam *Babad Demak*, Pupuh Sinom, disebutkan bahwa penyerangan ini dilakukan setelah musyawarah Wali Songo (Hutomo et al., 1984). Serangan ini menegaskan Demak sebagai kerajaan Islam yang berdaulat meskipun tidak sepenuhnya menghancurkan Majapahit (Hasbullah, 2009).

Menurut teori *realism in international relations* (Morgenthau, 1948), negara atau kerajaan akan membentuk aliansi militer berdasarkan kepentingan keamanan dan kekuatan relatif. Demak dan Cirebon membentuk koalisi militer sebagai respons terhadap ancaman eksternal, dalam hal ini Majapahit dan Pajajaran yang mencoba mempertahankan kekuasaannya (El-Jaquene, 2020; Ongkodharma, 1995, hal. 72).

Ancaman Majapahit semakin nyata pada awal abad ke-16 M ketika kerajaan Hindu ini mencoba membangun aliansi dengan Portugis di Malaka. Patih Mahodara, salah satu petinggi Majapahit, mengirim utusan ke Portugis untuk mendapatkan bantuan militer guna menghadapi ekspansi Demak (Sudjana, 1987). Meskipun bantuan Portugis tidak kunjung datang, Demak tetap memperkuat militernya dengan merekrut pasukan dari berbagai daerah, termasuk Cirebon, Palembang, Kudus, Jipang, Jepara, Pasai, dan Tumasik (Abdullah, 2020; Ali, 2022). Pasukan ini berbaiat kepada Raden Patah sebagai *Sultan Syah Alam Akbar* untuk menaklukkan Majapahit. Akhirnya, pada 1517, Majapahit mengalami kemunduran besar akibat serangan gabungan ini (Birsyada, 2016, p. 328; Laffan, 2015, hal. 10–11).

Selain menghadapi ancaman internal dari Majapahit, Demak juga menghadapi ekspansi Portugis di Malaka. Aliansi militer Demak dan Cirebon diperkuat dengan pengiriman pasukan laut untuk menyerang Portugis pada 1521, dipimpin oleh Adipati Unus dengan dukungan

panglima dari Cirebon, seperti Ki Gedeng Bungko dan Adipati Keling (Sudjana, 1987). Meskipun serangan ini gagal dan Adipati Unus gugur, serangan ini menegaskan peran Cirebon sebagai sekutu strategis Demak dalam perlawanan terhadap Portugis (Rahardjo et al., 1996; Utami et al., 2023).

Ketika Pajajaran menjalin persekutuan dengan Portugis pada 1522 M dan mendirikan pangkalan di Sunda Kelapa, Demak dan Cirebon kembali membangun aliansi politik untuk menghadapi ancaman ini. Sultan Trenggono dari Demak, dengan dukungan pasukan Cirebon yang dipimpin oleh Fatahillah, menyerang dan mengusir Portugis dari Sunda Kelapa pada 22 Juni 1527 M (Majid, 1995, hal. 78; Ongkodharma, 1995, hal. 72; Rahardjo et al., 1996). Kemenangan ini memperkuat posisi Demak dan Cirebon sebagai kekuatan Islam utama di Jawa, sekaligus memperluas wilayah kekuasaan mereka ke Galuh, Talaga, Indramayu, Sumedang, Tuban, Madiun, Pasuruan, Kediri, dan Blambangan (Purwadi, 2010; Purwadi & Maharsi, 2012).

e. Konflik Suksesi di Demak dan Keterlibatan Cirebon

Tragedi politik di Demak dimulai setelah wafatnya Pati Unus (1518–1521 M). Setelah gugurnya Pati Unus dalam pertempuran melawan Portugis, Raden Trenggono melakukan manuver politik untuk menyingkirkan saudaranya, Raden Kikin, sebagai pesaing utama dalam perebutan takhta. Intrik ini melibatkan anak Raden Trenggono, Sunan Prawoto, yang memerintahkan Ki Suroyoto untuk membunuh Raden Kikin di sebuah jembatan setelah salat Jumat (Romdhoni, 2018). Jenazah Raden Kikin yang dibuang ke sungai menyebabkan ia mendapat gelar *Pangeran Sekar Seda Ing Lepen* (de Graaf & Pigeaud, 1985, hal. 88; Mehellou et al., 2023).

Dalam teori *power transition* (Organski, 1958), dinyatakan bahwa konflik suksesi terjadi ketika perubahan keseimbangan kekuatan memunculkan tantangan bagi kepemimpinan yang ada. Kasus Demak menggambarkan bagaimana perebutan kekuasaan tersebut dapat memicu pertumpahan darah dan

ketidakstabilan kerajaan.

Setelah kematian Raden Kikin, putranya Arya Penangsang menuntut balas kepada Sunan Prawoto dengan mengutus Rangkud untuk membunuhnya (Achmad, 2020; de Graaf & Pigeaud, 1985, hal. 93–94; Romdhoni, 2021). Serangan ini juga menyebabkan kematian istri Prawoto, Pangeran Hadiri (suami Ratu Kalinyamat), serta Pangeran Pasarean dari Cirebon. Peristiwa ini menyebabkan kemarahan besar di pihak Cirebon, yang kemudian membantu upaya penghancuran kekuatan Arya Penangsang. Dengan bantuan Cirebon dan para sekutu lainnya, Danang Sutawijaya akhirnya membunuh Arya Penangsang dan mendirikan Kesultanan Mataram (de Graaf & Pigeaud, 1985, pp. 94–95; Waluyo, 2021; Yatim, 2011, hal. 212).

Dalam konflik ini, keterlibatan Cirebon bukan hanya sebatas balas dendam, tetapi juga bagian dari strategi geopolitik untuk mendukung kekuatan yang lebih stabil. Cirebon memilih mendukung Sultan Hadiwijaya (Jaka Tingkir) dari Pajang, yang lebih moderat dan memiliki visi ekspansi Islam yang sesuai dengan kepentingan Cirebon (Purwanto, 2017; Sulistiono, 2018; Yatim, 2011, hal. 213).

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian di atas, ditemukan bahwa hubungan antara Kesultanan Demak dan Cirebon bukan sekadar interaksi politik biasa, tetapi terbentuk melalui mekanisme yang kompleks. Dalam berbagai dinamikanya antara kontestasi dan aliansi, terlihat bahwa relasi antara Cirebon dan Demak terjalin melalui berbagai aspek, misalnya perkawinan antar wangsa elit, sanad keilmuan, dan dakwah Islam. Semua hal tersebut memperkuat peran kedua kesultanan ini dalam penyebaran Islam di Nusantara (Utami et al., 2023; Waluyo, 2021). Lebih jauh relasi keduanya berlanjut hingga aliansi politik dan militer. Dalam konteks ini, hal baru hasil kajian ini adalah bahwa sanad keilmuan dan dakwah Islam, perkawinan antar-wangsa elit, aliansi politik, hingga kerja sama militer memungkinkan kedua kesultanan ini untuk menggabungkan kekuatannya. Mekanisme yang kompleks ini relatif jarang diungkap kecuali dalam konteksnya yang

terpisah-pisah sehingga tidak dapat menunjukkan fakta adanya penggabungan dua kekuatan politik Islam di Nusantara ini yang memengaruhi arah politik Islam di Jawa khususnya pada masa itu. Oleh karena itu, kajian ini mengonfirmasi bahwa diplomasi politik Islam di Nusantara pada abad ke-15-16 M tidak hanya bergantung pada kekuatan militer, tetapi juga ditopang oleh jaringan sosial-keagamaan dan strategi aliansi.

Merujuk pada temuan di atas, dapat direkomendasikan bahwa, untuk pengembangan ilmu dalam studi sejarah Islam Nusantara perlu penekanan pada pendekatan interdisipliner yang menghubungkan aspek politik, keagamaan, keilmuan, dan militer hingga jaringan kekerabatan. Kajian lebih lanjut dapat dilakukan, misalnya, dengan mengeksplorasi bagaimana strategi politik berbasis perkawinan, sanad keilmuan, dan kerja sama militer berperan dalam membangun jaringan kekuasaan Islam di Nusantara. Selain itu, penelitian ke depan dapat memanfaatkan sumber-sumber primer seperti manuskrip dan naskah kuno lokal untuk memperkaya historiografi Islam Nusantara. Integrasi sejarah Islam Nusantara dalam kurikulum pendidikan juga perlu diperkuat, sehingga pelajar dan mahasiswa serta akademisi dapat memahami dinamika politik Islam pada masa lalu yang dapat memberikan wawasan dan perspektif dalam melihat perkembangan dunia Islam saat ini. Sedangkan dari sisi kebijakan, hasil kajian ini dapat dijadikan referensi dalam merumuskan strategi diplomasi berbasis sejarah dan khazanah Islam masa lalu. Pemerintah dapat mengambil inspirasi dari pola aliansi politik dan militer antara Demak dan Cirebon dalam membangun kerja sama strategis di kawasan Asia Tenggara, khususnya dalam bidang perdagangan dan pertahanan maritim. Selain itu, upaya untuk menguatkan hubungan lintas budaya dan keagamaan dapat menjadi bagian dari diplomasi internasional Indonesia, mengingat sejarah menunjukkan bahwa Islam di Nusantara berkembang melalui jejaring sosial dan politik yang luas. Pemerintah daerah juga dapat menjadikan sejarah hubungan Demak dan Cirebon sebagai bagian dari penguatan

identitas budaya, misalnya melalui pengembangan wisata sejarah dan edukasi publik mengenai peran kerajaan Islam dalam membentuk peradaban Nusantara.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon atas kesempatan dan juga dukungan dana sehingga kajian ini dapat terlaksana. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah (Skr. Fakultas Ushuluddin dan Adab) atas dukungan moril dan arahan serta fasilitas *in kind* dalam memperlancar penyelesaian kajian ini. Terima kasih juga kepada Kepala Puslit UIN Siber Cirebon yang banyak membantu dalam mengarahkan penyelesaian penelitian ini, baik secara administratif maupun substantif. Juga tak lupa terima kasih kepada Redaktur dan Pengelola Jurnal Dialog yang telah berkenan menerbitkan artikel ini.

Daftar Pustaka

- Abdullah, M. (2020). *Huru-Hara Majapahit dan Berdirinya Kerajaan Islam di Jawa*. Araska.
- Achmad, S. W. (2020). *Melacak Gerakan Perlawanan dan Laku Spiritualitas Ratu Kalinyamat*. Araska.
- Adeng, A. (2009). Kerajaan Tradisional Cirebon Abad XV-XIX. *Patanjala: Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya*, 1(2), 149–162. <https://doi.org/10.30959/patanjala.v1i2.242>
- Al Fairusy MA, M. (2024). Kontestasi Kuasa Dalam Perdagangan Rempah Di Pantai Barat Dan Selatan Aceh Abad Ke 18 Hingga 19 M. *Paradigma: Jurnal Kajian Budaya*, 14(1), 77–89. <https://doi.org/10.17510/paradigma.v14i1.1421>
- Ali, M. (2022). Kebijakan Politik Pragmatis Strategis Maulana Hasanuddin Banten (1546-1570) terhadap Portugis. *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, 7(1), 26–37. <https://doi.org/10.14710/jscl.v7i1.39859>
- Ambary, H. M. (1997). Peranan Cirebon Sebagai Pusat Perkembangan dan Penyebaran

- Islam. In Susanto Zuhdi (Ed.), *Cirebon Sebagai Bandar Jalur Sutra: Kumpulan Makalah Diskusi* (pp. 35–53). Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Anasom, Ismawati, & Anafah, N. (2020). *Sejarah Kasultanan Demak-Bintoro (Sultan Fatah, Masjid Agung Demak dan Kasultanan Demak-Bintoro)*. LP2M UIN Walisongo. <https://doi.org/10.12759/hsr.38.2013.3.59-75>
- Atja. (1986). *Carita Purwaka Caruban Nagari. Karya Sastra sebagai Sumber Pengetahuan Sejarah*. Proyek Pengembangan Per-museum Jawa Barat.
- Azra, A. (2013). *Jaringan Ulama Timur Tengah & Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII*. Kencana.
- Barth, C. (2013). In illo tempore, at the Center of the World: Mircea Eliade and Religious Studies' Concepts of Sacred Time and Space. *Historical Social Research*, 38(3), 59–75. <https://doi.org/https://doi.org/10.12759/hsr.38.2013.3.59-75>
- Birsyada, M. I. (2016). Legitimasi Kekuasaan atas Sejarah Keruntuhan Kerajaan Majapahit dalam Wacana Foucault. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 24(2), 311–332. <https://doi.org/10.21580/ws.24.2.974>
- Budiardjo, M. (2007). *Dasar-Dasar Ilmu Politik (Revisi)*. Gramedia Pustaka Utama.
- Burhanuddin, J. (2017). *Islam dalam Arus Sejarah Indonesia*. Kencana.
- Burhanudin, J. (2018). Converting Belief, Connecting People: The Kingdoms and the Dynamics of Islamization in Pre-Colonial Archipelago. *Studia Islamika*, 25(2), 247–278. <https://doi.org/10.15408/sdi.v25i2.5682>
- Burhanudin, J. (2023). 'Ulamâ' and the Formation of Islamic Knowledge: Learning from Two Historical Experiences in Sumatra. *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, 7(2), 108–123. <https://doi.org/10.14710/jscl.v7i2.48936>
- Carey, P. B. R. (2008). *The Power of Prophecy; Prince Dipanagara and the end of an old order in Java 1785-1855*. KITLV Press. <https://doi.org/10.1163/9789067183031>
- de Graaf, H. J., & Pigeaud, T. G. (1985). *Kerajaan-Kerajaan Islam di Jawa, Peralihan dari Majapahit ke Mataram*. Grafiti Pers.
- Djajadiningrat, R. H. (1983). *Tinjauan Kritis tentang Sejarah Banten: Sttmbangan bagi Pengenalan Sifat-Sifat Penulisan Sejarah Jawa*. Djambatan.
- Dwicahyo, S. (2021a). Benteng Bescherming di Cirebon: Konteks Politik, Fitur Fisik, dan Fungsinya pada Akhir Abad Ke-17. *Patrawidya: Seri Penerbitan Penelitian Sejarah Dan Budaya*, 22(1), 81–100. <https://doi.org/10.52829/pw.299>
- Dwicahyo, S. (2021b). Out of A Crocodile's Mouth, Enter A Tiger's Snout: Kingship in Cirebon and the Dutch East India Company's Intervention in the Late Seventeenth Century [Leiden University]. In *M.A. Thesis*. <https://studenttheses.universiteitleiden.nl/access/item%3A3069581/view>
- El-Jaquene, F. T. (2020). *Hitam-Putih Pajajaran: dari Kejayaan Hingga Keruntuhan Kerajaan Pajajaran*. Araska.
- Eliade, M. (1959). *The Sacred and the Profane: The Nature of Religion*. Harcourt Brace Jovanovich.
- Fakih, M. A. (2024). *Sejarah Ringkas Kerajaan Demak: Sejarah Peradaban Leluhur Nusantara*. DIVA Press.
- Fuadi, M. A. (2021). Islamization and the Transition of Power in Nusantara According to Kiai Abul Fadhol's A%lâ al-Musâmarah. *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*, 16(1), 80–104. <https://doi.org/10.15642/islamica.2021.16.1.80-104>
- Gottschalk, L. (1986). *Mengerti Sejarah*. Universitas Indonesia.
- Hakim, L., Arsa, D., Meria, A., & Sandora, L. (2020). Analisis Historiografi terhadap Karya Azyumardi Azra "Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII Akar Pembaruan

- Islam Indonesia." *Jurnal Lektur Keagamaan*, 18(2), 517–546. <https://doi.org/https://doi.org/10.31291/jlka.v18i2.795>
- Hasbullah, M. (2009). King, Identity and Islamization: Psycho-social Aspects of Religious Conversion in Southeast Asia in the 15 th-17th Centuries. *Tawarikh, International Journal for Historical Studies*, 1(1), 1–14. <https://journals.mindamas.com/index.php/tawarikh/article/view/365>
- Hasyim, A. W. (2021). Demak Sultanate: The Fortress of Islamic Greatness in the Middle Ages Java Island. *Buletin Al-Turas*, 27(1), 1–16. <https://doi.org/10.15408/bat.v27i1.16400>
- Hutomo, S. S., Hudiyono, E. Y., Djamaudin, T., & Astuti, H. (1984). *Penelitian Bahasa dan Sastra Babad Demak*. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Jassin, S., & Hidayat, A. A. (2019). Peran Keturunan Prabu Siliwangi dalam Proses Islamisasi Tatar Sunda Abad XVI Perspektif Naskah. In A. Supianudin (Ed.), *Sunda Dalam Kontak Kebudayaan dan Peradaban Islam Dunia: Sebuah Antologi Pemikiran dan Penelusuran Awal Khazanah Kajian Islam di Sunda* (pp. 96–111). Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sunan Gunung Djati.
- Kartika, N., Piliang, Y. A., Santosa, I., & Dienaputra, R. D. (2020). The Visual Arts of Masjid Agung Sang Cipta Rasa Cirebon: Hybrid Culture Identity. *Harmonia: Journal of Arts Research and Education*, 20(1), 95–107. <https://doi.org/10.15294/harmonia.v20i1.17525>
- Kartodirdjo, S. (1993). *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500 - 1900. Dari kolonialisme sampai nasionalisme* (Issue v. 2). Gramedia.
- Kelly, C. (1987). "To Persuade without Convincing": The Language of Rousseau's Legislator. *American Journal of Political Science*, 31(2), 321–335. <https://doi.org/10.2307/2111079>
- Khafid, M. (2008). *Sejarah Demak Matahari Terbit di Glagahwangi*. Syukur. https://fliphtml5.com/jaypm/fqxt/Sejarah_Demak_Matahari_Terbit_di_Glagahwangi/
- Koswara, D., Permana, R., & Hyangsewu, P. (2019). The Values of Local Culture Wisdom of Walangsungsang (Pangeran Cakrabuana): A Philological Study. *UPI 2nd International Conference on Language, Literature, Culture and Education (ICOLLITE 2018)*, 257, 390–394.
- Kuntowijoyo. (1994). *Metodologi Sejarah*. Tiara Wacana.
- Laffan, M. (2015). *Sejarah Islam di Nusantara*. Bentang Pustaka.
- Lapidus, I. M. (2014). *A History of Islamic Societies*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.5860/choice.188862>
- Lasmiyati. (2013). Keraton Kanoman di Cirebon (Sejarah dan Perkembangannya). *Patanjala: Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya*, 5(1), 131–147. <https://doi.org/10.30959/patanjala.v5i1.184>
- Levi-Strauss, C. (1969). *The Elementary Structures of Kinship*. Beacon Press.
- Levi, D., & Kocher, S. (2013). Perception of Sacredness at Heritage Religious Sites. *Environment and Behavior*, 45(7), 912–930. <https://doi.org/10.1177/0013916512445803>
- Madjid, N. (2020). Islam, Doktrin dan Peradaban. In Budhy Munawar-Rachman (Ed.), *Karya Lengkap Nurcholish Madjid*. Nurcholish Madjid Society/NCMS.
- Majid, M. D. (1995). Awal Perkembangan Islam di Jakarta dan Pengaruhnya Hingga Abad XVII. In R. Z. Leirissa (Ed.), *Sunda Kelapa sebagai Bandar Jalur Sutra: Kumpulan Makalah Diskusi* (pp. 78–94). Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Man, N. M., Chi, N. T. P., Wasino, W., & Hartatik, E. S. (2022). Ports, Maritime Networks, and Its Effect on the Development of the Ancient Kingdom of Southeast Asia. *Paramita: Historical Studies Journal*, 32(2), 202–211. <https://doi.org/10.15294/paramita.v32i2.37833>
- Marwoto, Maryono, A., & Rahmat, A. (2014). Masjid Agung Demak Sebagai Pencitraan

- Kawasan Kota. *Temu Ilmiah Iplbi 2014*, 17–22. https://www.academia.edu/37249879/Masjid_Agung_Demak_Sebagai_Pencitraan_Kawasan_Kota
- Maulana, W. I., Astana, C. B., Wijayanti, F., & Kumalasari, D. (2024). Maritime Activities of the Demak Sultanate: Shipping and Trade Route in the Nusantara Network (1478-1546). *Journal of Al-Tamaddun*, 19(1), 261–272. <https://doi.org/10.22452/JAT.vol19no1.19>
- McGee, R. J., & Warms, R. L. (Eds.). (2013). Alliance-Descent Debate. In *Theory in Social and Cultural Anthropology: An Encyclopedia*. SAGE Publications, Inc. <https://doi.org/10.4135/9781452276311.n2>
- Mehellou, A., Saleh, M. S. M., & Omar, B. (2023). Maqâcid al-Sharî'ah as Goal Framing for Sustainable Behaviours: A Conceptual Framework. *Intellectual Discourse*, 31(1), 183–209. <https://doi.org/10.1093/mictod/qaac015>
- Menget, P. (2008). Kinship Theory after Lévi-Strauss' Elementary Structures. *Journal de La Société Des Américanistes*, 94(2), 29–37. <https://doi.org/10.4000/jsa.10549>
- Morgenthau, H. J. (1948). *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*. Alfred A. Knopf.
- Nizam, A. (2022). Konsep Penciptaan Ornamen Teratai Pada Masa Islam Peralihan. *Patrawidya: Seri Penerbitan Penelitian Sejarah Dan Budaya*, 23(2), 4–12.
- Ongkodharma, H. (1995). Pelabuhan Sunda Kelapa dan Kesultanan Banten. In R. Z. Leirissa (Ed.), *Sunda Kelapa sebagai Bandar Jalur Sutra: Kumpulan Makalah Diskusi* (pp. 69–77). Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Organski, A. F. K. (1958). *World Politics*. Alfred A. Knopf.
- Pires, T. (1944). *The Suma Oriental of Tomé Pires: An Account of the East, from the Red Sea to Japan, Written in 1512–1515*. The Hakluyt Society.
- Prechel, H. (1980). Exchange In Levi-Strauss's Theory of Social Organization. *Mid-American Review of Sociology*, 5(1), 55–66. <http://www.jstor.org/stable/23252483> .
- Pudjiastuti, T. (2000). *Sadjarah Banten: Suntingan Tteks dan Terjemahan Disertai Tinjauan Aksara dan Amanat*. Universitas Indonesia.
- Pudjiastuti, T. (2007). *Kajian Kodikologis atas Surat Sultan Kanoman , Cirebon*. 9(1), 51–61.
- Purnomo, B., & Dinar, A. (2023). Islam at the Northern Coast of Java in the Sufistic Symbols Sejatiné Manusa Manuscript. *Jurnal Lektur Keagamaan*, 21(1), 157–188. <https://doi.org/10.31291/jlka.v21i1.1080>
- Purwadi. (2010). *The History of Javanese Kings-Sejarah Raja-Raja Jawa*. Ragam Media.
- Purwadi, & Maharsi. (2012). *Babad Demak: Sejarah Perkembangan Islam di Tanah Jawa*. Pustaka Utama.
- Purwanto, B. (2017). Memperebutkan Wahyu Majapahit Dan Demak: Membaca ulang Jejak Kesultanan Pajang Dalam Historiografi Indonesia. *Patrawidya: Seri Penerbitan Penelitian Sejarah Dan Budaya*, 18(3), 253–271.
- Putnam, R. D. (1993). *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton University Press.
- Putuhena, M. S. (1997). Proses Perluasan Agama Islam di Maluku Utara. In G. A. Ohorella (Ed.), *Ternate Sebagai Bandar di Jalur Sutra: Kumpulan Makalah Diskusi* (pp. 73–82). Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Putuhena, M. S. (2007). *Historiografi Haji Indonesia*. LKiS.
- Qosim, M. R. (2019). *Di Balik Runtuhnya Majapahit dan Berdirinya Kerajaan-Kerajaan Islam Di Jawa*. Araska.
- Rahardjo, S., Manus, M. P. B., & Haryono, P. S. (1996). *Sunda Kelapa Sebagai Bandar Di Jalur Sutra*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. https://repositori.kemdikbud.go.id/13479/1/Sunda_kelapa_sebagai_bandar_di_jalur_sutra_laporan_penelitian_tahun_1996.PDF

- Reid, A. (1984). The Islamization of Southeast Asia. In M. A. Bakar, A. Kaur, & A. Z. Ghazali (Eds.), *Historia: Essays in Commemoration of the 25th Anniversary of the Department of History, University of Malaya* (pp. 13–33). Malaysian Historical Society. <http://hdl.handle.net/1885/143664>
- Reid, A. (2011). *Asia Tenggara dalam Kurun Niaga 1450-1680 Jilid 2*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Richtig, I., & Maulana, I. (2022). Fragmentasi ke Konvergensi: Asatiz Selebriti dalam Bingkai Gerakan Dakwah Barisan Bangun Negeri. *Dialog*, 45(2), 258–272. <https://doi.org/10.47655/dialog.v45i2.673>
- Ricklefs, M. C. (2006). *Mystic Synthesis in Java: A History of Islamization from the Fourteenth to the Early Nineteenth Centuries*. EastBridge. <https://doi.org/LK> - <https://worldcat.org/title/1085493352>
- Ricklefs, M. C. (2007). *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*. Serambi.
- Ririmasse, M. N. (2017). Sebelum Jalur Rempah: Awal Interaksi Niaga Lintas Batas di Maluku dalam Perspektif Arkeologi. *Kapata Arkeologi*, 13(1), 47. <https://doi.org/10.24832/kapata.v13i1.388>
- Romdhoni, A. (2018). *Istana Prawoto Jejak Pusat Kesultanan Demak*. Pustaka Compass.
- Romdhoni, A. (2021). *Sunan Prawoto Penjaga Visi Politik Maritim Kesultanan Demak Bintara*. Literatur Nusantara (Linus).
- Rosidin, D. N. (2017). Ulama Pasca Sunan Gunung Jati: Jaringan Intelektual Islam Cirebon Abad ke-16 sampai dengan Abad ke-18. *JSW: Jurnal Sosiologi Walisongo*, 1(2), 177–194. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21580/jsw.2017.1.2.1993>
- Saebani, B. A. (2008). *Metode Penelitian*. Pustaka Setia.
- Sakhok, J., & Musadad, A. N. (2024). The Wali-Songo and (Western) Historiography: A Critical Review of a Methodological Achievement. *Journal of Al-Tamaddun*, 19(1), 105–119. <https://doi.org/10.22452/JAT.vol19no1.8>
- Sudardi, B., & Istadiyantha, I. (2020). The Javanese War: Prince Diponegoro and the Legendary Rebellion Movement against the Dutch Colonial Regime. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal) : Humanities and Social Sciences*, 3(4), 3170–3178. <https://bircu-journal.com/index.php/birci/article/view/1350>
- Sudjana, T. D. (1987). *Naskah Negara Kretabhumi Tritya Sarga, Alih Aksara dan Bahasa*. Pustaka Keraton Kanoman.
- Sudjana, T. D. (2003). *Masjid Sang Ciptarasa Dan Muatan Mistiknya*. Humaniora Utama Press.
- Sukatno, O., & Mulyono, U. (2021). *Pararaton: Kronologi Genealogi Sejarah Wangsa Jawa Dari Awal Tradisi dan Munculnya Islam Versi Raffles*. Nusamedia.
- Sulasman. (2014). *Metedologi penelitian sejarah*. Pustaka Setia.
- Sulendraningrat, P. S. (n.d.). *Sejarah Cirebon dan Silsilah Sunan Gunung Jati Maulana Syarif Hidayatullah (Cet. Ketiga (Revisi))*. Toko Buku Kitab Asy-Syarqiyah.
- Sulendraningrat, P. S. (1984). *Babad Tanah Sunda/ Babad Cirebon*.
- Sulendraningrat, P. S. S., & Sudjana, T. D. (1983). *Naskah Purwaka Caruban Nagari 1720 Alih Aksara dan Bahasa*. Paguron Krapyak Keprabon.
- Sulistiono, B. (2018). Faktor Pendukung Terbentuknya Jaringan Perdagangan antar Kesultanan di Nusantara. In *Buletin Al-Turas* (Vol. 17, Issue 1, pp. 25–38). <https://doi.org/10.15408/bat.v17i1.4288>
- Sulistiyono, S. T. (1997). Dari Lemahwungkuk hingga Cheribon: Pasang Surut Perkembangan Kota Cirebon Sampai Awal Abad XX. In Susanto Zuhdi (Ed.), *Cirebon Sebagai Bandar Jalur Sutra: Kumpulan Makalah Diskusi* (pp. 77–116). Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Sunardjo, U. (1996). *Selayang Pandang Sejarah Masa Kejayaan Kerajaan Cirebon: Kajian dari*

- Aspek Politik dan Pemerintahan*. Yayasan Keraton Kasepuhan Cirebon.
- Sunyoto, A. (2017). *Atlas Wali Songo* (7th ed.). Pustaka IIMaN dan LESBUMI PBNU.
- Sya'roni, M., Arafat, A. T., Rikza, M., Zuhri, M. K., Kharomen, A. I., Malik, A., Makmun, M., & Khamdun, I. (Eds.). (2022). *The Living Walisongo: Historisitas, Kontekstualitas dan Spiritualitas*. Southeast Asian Publishing.
- Thahir, L. S. (2021). Islam of the Archipelago: Cosmopolitanism of Islamic Civilization in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 21(1), 23–45. <https://doi.org/10.22373/jiif.v0i0.5794>
- Tjandrasasmita, U. (1997). Bandar Cirebon Dalam Jaringan Pasar Dunia. In Susanto Zuhdi (Ed.), *Cirebon Sebagai Bandar Jalur Sutra: Kumpulan Makalah Diskusi* (pp. 55–75). Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Tjandrasasmita, U. (2003). Al-Shabakah al-Tijâriyyah li al-Sultanah al-Indûnîsiyyah fî Qarn 15-17 M. In *Studia Islamika* (Vol. 10, Issue 3, pp. 125–148). Gedung Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta. <https://doi.org/10.15408/sdi.v10i3.625>
- Tjandrasasmita, U. (2009). Al-Sulmânah fî Cirebon: Dirâsah Târîkhîyah wa Thaqa'fiyah. *Studia Islamika*, 16(2), 323–345. <https://doi.org/10.15408/sdi.v16i2.485>
- Tjandrasasmitha (Ed). (2009). *Sejarah Nasional Indonesia III Edisi Pemutakhiran*. Balai Pustaka.
- Turner, J. C. (2005). Explaining the Nature of Power: A Three-Process Theory. *European Journal of Social Psychology*, 35(1), 1–22. <https://doi.org/10.1002/ejsp.244>
- Ubaidillah, U., & Marpuah, S. (2021). Interrelation of Religion and Culture in Gunung Tradition Cosmology: Islamic and Javanese Perspectives. *Karsa: Journal of Social and Islamic Culture*, 29(2), 34–55. <https://doi.org/10.19105/karsa.v29i2.3869>
- Utami, C. S. M., Wijayati, P. A., Milla, N. P., & Rohman, M. (2023). Ekonomi Perdagangan dan Penyebaran Islam: Menelusik Kejayaan Demak dalam Jaringan Kemaritiman. In *Bookchapter Ekonomi Universitas Negeri Semarang* (pp. 72–100). Universitas Negeri Semarang. <https://bookchapter.unnes.ac.id/index.php/ie/article/view/113>
- Waluyo, S. (2021). Arya Penangsang: Santri Kesayangan Sunan Kudus sebagai Pembangun Memori Kolektif dalam Revitalisasi Kota Cepu. *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya*, 5(2), 229–242. <https://doi.org/10.15575/rjsalb.v5i2.11350>
- Yakub, M. (2013). Historiografi Islam Indonesia: Perspektif Sejarahwan Informal. *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 37(1), 159–177. <https://doi.org/10.30821/miqot.v37i1.94>
- Yatim, B. (2011). *Sejarah Peradaban Islam*. PT RajaGrafindo Persada.
- Zaedin, M. M., Sariati, A., & Sutaraharja, K. T. (2020). *Sejarah Peteng: Sejarah Rante Martabat Tembung Wali*. K-Media.